

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)

Yayat Hidayat¹ Omo Permana² Mungguh Subekti³

Universitas Insan Cendikia Mandiri^{1,3}

Universitas Islam Nusantara²

Email: hidayatuninuss31714@gmail.com¹ omopermana1967@gmail.com²
mungguhsubekti@ymail.com³

Abstract

The purpose of this study is to determine the role of DPMD in empowering the community through BUMDes and to know the inhibiting factors and solutions regarding the process of advancing BUMDes. The method used in this study is a descriptive method using a qualitative approach. Researchers collect data by going to the field with interview and observation techniques. Community empowerment that has been carried out by BUMDes Mawa Raharja is through circular economy activities and the utilization of village potential, namely the natural beauty owned by Cibiru Wetan Village so that it is used as a tourist attraction including Tangga Seribu and Batu Kuda. The Community and Village Empowerment Office of West Java Province has two roles in empowering the community through BUMDes in Cibiru Wetan Village, namely as extension workers and facilitators. The obstacles experienced by DPMD in advancing BUMDes are technical obstacles and also the village's original income. In order for DPMD to be more optimal in carrying out the next task, there is a suggestion, namely that the village government is expected to cooperate with BUMDes in optimizing village potential by making village regulations regarding village financial management and building community participation to build businesses. Furthermore, BUMDes can establish relationships with external parties through AKSARA (Champion Village Academy) activities.

Keywords: DPMD, PUEM, BUMDes

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPMD dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes serta mengetahui faktor penghambat dan solusi mengenai proses memajukan BUMDes. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan turun ke lapangan dengan teknik wawancara dan observasi. Pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh BUMDes Mawa Raharja ialah melalui kegiatan ekonomi sirkular serta pemanfaatan potensi desa yaitu keindahan alam yang dimiliki oleh Desa Cibiru Wetan sehingga dijadikan sebagai objek wisata diantaranya adalah Tangga Seribu dan Batu Kuda. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat memiliki dua peran dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes di Desa Cibiru Wetan yaitu sebagai penyuluh dan fasilitator. Hambatan yang dialami oleh DPMD dalam memajukan BUMDes adalah kendala teknis dan juga pendapatan asli desa. Agar DPMD lebih optimal dalam menjalankan tugas selanjutnya maka terdapat saran yaitu diharapkan pemerintah desa bekerja sama dengan BUMDes dalam optimalisasi potensi desa dengan membuat peraturan desa mengenai pengelolaan keuangan desa serta membangun partisipasi masyarakat untuk membangun usaha. Selanjutnya BUMDes dapat menjalin relasi dengan pihak luar melalui kegiatan AKSARA (Akademi Desa Juara).

Kata Kunci: DPMD, PUEM, BUMDes



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat adalah sebuah lembaga pemerintahan yang mengurus bagaimana cara memberdayakan masyarakat dan desa, khususnya di wilayah Jawa Barat. Karena itu, peneliti memilih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penelitian. Peneliti yakin ilmu yang diperolehnya selama berkuliah di Universitas Insan Cendekia Mandiri dapat diimplementasikan secara efektif. Implementasi dari pendidikan masyarakat telah dan sedang dijalani sehari-hari dan berdampingan dengan kehidupan. Seperti halnya melakukan sosialisasi dengan sesama merupakan bentuk kegiatan dari pilar pendidikan learning to live together. Bahkan untuk sekedar mengetahui sesuatu pun termasuk implementasi dari pendidikan masyarakat. Hal tersebut akan peneliti kaitkan dengan program yang ada di instansi tempat peneliti melakukan penelitian. Lembaga tersebut memiliki beberapa cara untuk memberdayakan masyarakat, diantaranya melalui program posyandu juara, desa digital, desa wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lain-lain. Keterkaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, akan membahas mengenai BUMDes.

BUMDes merupakan instansi pemerintah yang dijalankan oleh rakyat dan diawasi oleh pemerintah. BUMDes diatur oleh pemerintah desa, baik dari segi struktur, operasional, maupun manfaat yang diperoleh sebagai akibat dari keistimewaan desa. Pemerintah mengupayakan kemajuan BUMDes melalui undang-undang yang mengatur tentang desa. Penjelasan mengenai BUMDes, tertulis dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-undang tersebut dibuat agar dapat diketahui tentang adanya hukum tentang instansi yang diatur. Ketentuan ini akan membantu harmonisasi dan sinkronisasi operasi pemerintah dengan memodifikasi peraturan yang ada sehingga tidak terjadi adanya peraturan yang saling berlawanan. Dalam usaha yang dijalankan oleh sebuah desa, maka perlu adanya dana demi kelancarannya. Setelah memiliki dana, desa dapat menentukan untuk usaha dan hasil dari usaha tersebut dapat memberdayakan masyarakat dan apabila usaha terus berjalan hingga menjadi besar, dapat mengubah strata desa menjadi status mandiri. Desa dengan strata tersebut berarti memiliki masyarakat dengan kondisi ekonomi yang baik dan berkecukupan.

Menurut data Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat tahun 2022, diketahui bahwa desa Cibiru Wetan merupakan desa dengan status desa mandiri. Hal tersebut berarti desa Cibiru Wetan termasuk desa yang berkecukupan dari segi ekonomi, sosial dan pendidikannya. Namun peneliti mendapatkan informasi dari salah satu staff di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat yaitu Ibu Desi Susanti, mengatakan bahwa BUMDes milik desa Cibiru Wetan masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. BUMDes sendiri memiliki peran yang dapat berpengaruh dalam kemajuan sebuah desa. Program Pendidikan Masyarakat adalah upaya pemberdayaan masyarakat, serta peneliti melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat yang mana memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana tujuannya untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai apa yang sedang diteliti. Beberapa hal yang disiapkan peneliti sebelum penelitian yaitu instrumen penelitian diantaranya pedoman untuk melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi. Panduan tersebut bertujuan agar mempermudah kegiatan penelitian agar lebih fokus dan terarah dalam mendapatkan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat. Salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat yaitu dapat dilakukan melalui BUMDes. Melalui wawancara dengan PUEM (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat) yang diwakili oleh Bapak Dicky selaku Kepala Bidang serta Bapak Ucup sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat, serta wawancara bersama Ibu Desi Susanti dari bidang Bina Desa, peneliti memperoleh jawaban mengenai bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Cibiru Wetan melalui BUMDes, hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran DPMD Provinsi Jawa Barat sebagai Penyuluh. DPMD Provinsi Jawa Barat sebagai penyuluh adalah salah satu fungsi pemerintah dalam menyediakan masyarakat dengan sarana untuk terlibat dalam proses pembangunan sambil tetap tenang dan patuh, serta dalam mengelola dan meningkatkan sifat dinamis dari pembangunan. Peran pemerintah sebagai penyuluh adalah untuk memberikan saran dan bimbingan yang efektif kepada rakyat tanpa mengungkapkan perbedaan pendapat atau strata sosial. Bimbingan, arahan, dan masukan dari pemerintah pasti diperlukan ketika mencoba untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi pemerintah dalam masyarakat melalui penggunaan lembaga atau penyuluh terkait yang berbasis di sana dan yang menawarkan arahan bimbingan atau penjangkauan kepada masyarakat.
 - a. Pendampingan dan Pembinaan. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat terhadap BUMDes di Desa Cibiru Wetan ditujukan untuk beberapa hal seperti akan diadakannya lomba desa tingkat nasional, program ekonomi sirkular dan juga sekolah bisnis desa. Pendampingan yang dilakukan juga sekaligus untuk sosialisasi ke BUMDes. Ketiga program yang diikuti oleh Desa Cibiru Wetan memiliki tujuan yang sama yaitu agar dapat memberdayakan masyarakatnya melalui apa yang mereka miliki, oleh karena itu, hal tersebut harus terus dibina agar Desa Cibiru Wetan dapat memanfaatkan potensi yang ada. Setiap program memiliki fokusnya sendiri-sendiri, namun karena dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengurus satu desa saja, kegiatan pendampingan dilakukan sekalian dengan program lain. Kegiatan ekonomi sirkular ini juga dimaksudkan untuk memajukan masyarakat. Berbeda dengan model ekonomi linier, model ekonomi sirkular lebih fokus pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sementara model ekonomi linier penggunaan suatu barang berakhir dengan pembuangan, model ekonomi sirkular merancang sistem mereka dari sudut pandang produk, penggunaan, akhir masa pakai, dan pembuatan ulang, menurut Valavanidis (2018).
 - b. Pelatihan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa kegiatan dalam rangka memajukan BUMDes Mawa Raharja. Seperti ditulis pada sub-bab sebelumnya yaitu pendampingan dan pembinaan. Selain itu juga mengadakan pelatihan. Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat terhadap Desa Cibiru Wetan tidak hanya diikuti oleh anggota BUMDes saja, melainkan ada kepala desa, aparat desa itu sendiri, BUMDes, kebetulan banyak ibu-ibu kelompok tani, ibu-ibu PKK dan para peternak. Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat terhadap Desa Cibiru juga bertujuan agar SDM di sana semakin maju. Hal tersebut sebenarnya sudah berdampak baik pada Desa Cibiru Wetan. Terbukti bahwa Desa Cibiru Wetan merupakan desa dengan status mandiri menurut Indeks Desa Membangun 2022, dan juga Cibiru Wetan berhasil menjuarai kompetisi lomba desa dan kelurahan tingkat nasional pada tahun 2022 serta menjadi desa anti korupsi. Prestasi lain dilihat dengan Desa Cibiru Wetan sebagai

Desa Peduli Pendidikan Tingkat Nasional, Desa Aman Pangan Tingkat Nasional, dan Desa dengan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional.

2. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebagai Fasilitator. Peran dari pemerintah bagi pemberdayaan masyarakat sudah sepatutnya menyalurkan bantuan berupa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada penelitian ini peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai fasilitator yang menyediakan alat dan bahan untuk pertanian.
 - a. Penyediaan bibit, polybag dan keperluan lainnya. Peserta pelatihan tidak perlu menyiapkan alat dan bahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat telah menyiapkannya dengan matang beserta pematernya yang mana khusus didatangkan dari ahlinya menurut bidang masing-masing. Lebih lanjut berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang telah di wawancarai oleh peneliti berkaitan dengan aspek penyediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya (fasilitator) maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat sudah merasakan berbagai bentuk bantuan pemerintah yang diberikan tersebut juga secara keseluruhan sampai kepada masyarakat khususnya petani dan peternak.
3. Hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam memajukan BUMDes Cibiru Wetan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan pembinaan dan pelatihan di Desa Cibiru Wetan memiliki beberapa hambatan menurut beberapa sudut pandang yaitu yang pertama adalah Tim Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) dan yang kedua adalah Tim Bidang Bina Desa.

Perspektif Tim Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)

Peneliti diarahkan oleh pihak sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat ke bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang lebih difokuskan untuk mengurus BUMDes di desa-desa yang tersebar di Jawa Barat. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ke Desa Cibiru Wetan tidak dilakukan secara lancar melainkan ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam memajukan BUMDes Cibiru Wetan yaitu BUMDes Mawa Raharja adalah sebagai berikut:

1. Kendala Teknis. Berdasarkan penjelasan dari informan dari bidang PUEM yaitu Pak Ucup, jalan di Cibiru Wetan tidak mudah untuk dilewati. Tidak semua kendaraan besar dapat masuk ke sana, sementara apabila ada kegiatan pendampingan, seluruh Tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat turun, hal ini memerlukan kendaraan yang besar agar dapat menampung banyak orang. Berdasarkan pernyataan dari /jadesta.kememparekraf.go.id juga menjelaskan bahwa Desa Cibiru Wetan terdapat area pegunungan yang mana apabila jika hujan maka jalanan akan licin.
2. Waktu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat tidak hanya menaungi desa-desa yang ada di Bandung dan sekitarnya, melainkan seluruh desa di Jawa Barat. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perolehan waktu oleh desa dimana untuk mendapatkan pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sangatlah terbatas. Waktu menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan pengembangan BUMDes. Hal tersebut karena jam kerja yang hanya delapan jam dan fokus mereka tidak

hanya ke satu desa melainkan ke seluruh desa yang berada di Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan juga tidak hanya berfokus pada BUMDes-nya saja, melainkan banyak poin seperti kegiatan ekonomi sirkular dan kegiatan lainnya mengingat waktu yang mereka miliki sangat terbatas, sedangkan desa di Jawa Barat sangat banyak jumlahnya, dimana mereka juga harus turun ke sana juga satu per satu.

Perspektif Tim Bidang Bina Desa

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan dari bidang bina desa yaitu diwakilkan oleh Ibu Desi Susanti, S. STP., M. Si., mendapatkan opini yang berbeda mengenai hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam memajukan BUMDes Cibiru Wetan yaitu BUMDes Mawa Raharja, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa. Bidang Bina Desa dalam melaksanakan tupoksinya, sebenarnya tidak langsung to the point ke BUMDes, Bidang Bina Desa melakukan tugasnya dengan mengatur pemerintahan desanya, namun hal ini berkorelasi dengan perekonomian suatu desa, dimana ada campur tangan dari Bidang Bina Desa juga dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Bidang Bina Desa memperlakukan mengenai dana pendapatan asli desa yang menjadi salah satu hambatan dari berkembangnya BUMDes. Namun, tugas dari Bidang Bina Desa itu sendiri tidak langsung menangani BUMDes-nya, melainkan pemerintahan desanya agar diarahkan bagaimana cara untuk mengembangkan BUMDes-nya. Pendapatan asli dari sebuah desa sangatlah penting. Apabila suatu desa memiliki pendapatan asli desa yang besar, maka desa tersebut dapat cepat berkembang dan maju karena tidak hanya menunggu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk desa, melainkan sudah memiliki pendapatan asli sendiri dimana dapat digunakan sesuka desa tersebut asalkan sudah dimusyawarahkan dengan masyarakatnya. Pendapatan asli desa yang kecil dapat menghambat kemajuan dari BUMDes. Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa. Agar desa dapat menjalankan perekonomiannya, terutama yang berkaitan dengan penanganan urusan keuangannya, desa itu dituntut mandiri, apabila sudah mandiri, sumber pendapatan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah. Menurut Atmadja, et al(2018)Desa memiliki fungsi yang strategis terhadap pemerintah daerah dalam membantu proses pengadaan pemerintahan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat serta pembangunan nasional yang mana menjadi tahapan nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap perkembangan daerah otonomnya.

Kepala Desa pada pemerintahan desa harus memiliki pengetahuan dan ilmu terhadap pengembangan dan pembangunan desa serta melakukan kewajibannya dengan baik dan benar khususnya pada aspek pengelolaan pendapatan asli desa. Berhasil atau tidaknya sistem pengelolannya tergantung pada kinerja pemerintah desa tersebut. Oleh karena itu, pihak perangkat pemerintah desa harus memiliki pengetahuan serta ilmu untuk mengelola desa dengan baik dan benar. Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa dalam menyadari mengenai munculnya banyak tantangan serta hambatan yang terjadi pada sistem pembangunan di suatu daerah, sehingga memerlukan suatu cara untuk mengatasi hal tersebut. Hal tersebut bertujuan agar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi bahkan hingga ke daerah yang terpencil sekalipun. Saputra dan Julianto (2016) mengatakan diperlukan ilmu untuk mengelola desa dengan baik.

Solusi untuk mengatasi faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam proses memajukan BUMDes Cibiru Wetan

Kendala atau hambatan tersebut harus segera diatasi dengan upaya untuk kemajuan bersama. Peneliti telah mewawancarai informan yang sesuai dengan bidang masing-masing, didapatkan solusi dari hambatan-hambatan yang ditemukan melalui wawancara. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Solusi dari PUEM (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat). Peningkatan kualitas SDM Desa Cibiru Wetan, dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat telah mengikutsertakan Desa Cibiru Wetan dalam sekolah bisnis desa. Selain itu juga membuka koneksi desa agar bekerja sama dengan pihak luar desa, serta menyebutkan potensi desa yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan asli desa.
2. Solusi dari Bidang Bina Desa. Diwakili oleh Ibu Desi sebagai informan, Ibu Desi memiliki beberapa solusi dalam memajukan desa termasuk juga BUMDes di dalamnya. Ibu Desi menyebutkan hambatan terbesar desa maupun BUMDes adalah pendapatan asli desa. Ibu Desi menjelaskan solusi untuk meningkatkan pendapatan asli desa sebagai berikut:
 - a. Menjalinkan Kerjasama melalui AKSARA (Akademi Desa Juara). AKSARA (Akademi Desa Juara) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mengedukasi para kepala desa se-provinsi Jawa Barat mengenai bagaimana menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk memajukan desanya. Pesertanya merupakan para pejabat desa dari berbagai desa yang telah diundang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. AKSARA memiliki tiga kelas yaitu Kelas Kerjasama Desa, Kelas Desa Digital, dan Kelas Pengembangan Potensi Desa.
 - b. Mengoptimalkan potensi desa. Potensi yang dimiliki oleh Desa Cibiru Wetan cukup banyak. Cibiru Wetan dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya seperti di bidang pertanian, peternakan dan desa wisata. Ikut serta Cibiru Wetan dalam berbagai kegiatan tentunya memiliki keuntungan untuk meningkatkan potensi desanya. Sebagai contoh kegiatan sekolah bisnis desa, Cibiru Wetan dapat belajar berbisnis dengan memanfaatkan hasil pertanian dan peternakannya, hal ini tentunya dapat menambah pendapatan asli desa. Selain kegiatan sekolah bisnis desa, kemudian ada kegiatan ekonomi sirkular. Hasil dari limbah pertanian dan peternakan akan memiliki nilai jual apabila dimanfaatkan dengan baik melalui kegiatan ekonomi sirkular. Kemudian, desa wisata harus selalu di-upgrade fasilitasnya agar menarik wisatawan lebih banyak lagi. Sebagai contoh adalah wisata batu kuda, Cibiru Wetan dapat menambah jumlah toilet agar pengunjung tidak berebut atau mengantri dengan lama.
 - c. Mengembangkan usaha melalui BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ucup mengatakan bahwa BUMDes Mawa Raharja sudah menjalankan tupoksinya dengan baik, namun informasi dari Ibu Desi mengatakan bahwa pendapatan asli desanya masih belum besar, oleh karena itu dari BUMDes-nya sendiri juga harus perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. BUMDes Mawa Raharja dapat meningkatkan produksi dengan kreativitas. Kegiatan ekonomi masyarakat desa bisa terlihat dari upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa itu sendiri. Apa yang dibutuhkan di masyarakat desa, itulah yang menjadi pokok kegiatan produksi.
 - d. Membuat peraturan desa terkait pengelolaan desa. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber dari Bidang Bina Desa yaitu Ibu Desi, desa dapat membuat peraturan mengenai pengelolaan desanya, contohnya dengan menyusun peraturan desa tentang misal pengelolaan suatu objek wisata.
 - e. Partisipasi masyarakat untuk membangun usaha. Meninjau laporan statistik keuangan pemerintah desa yang dipublikasi BPS (2023), rasio kemandirian keuangan desa di Indonesia tergolong dalam kategori sangat rendah yaitu hanya sebesar 2,53 persen.

Angka ini mengindikasikan perlu adanya upaya ekstra untuk meningkatkan kapasitas desa dalam membiayai kegiatannya sendiri. Rendahnya capaian PADes perlu mendapat sorotan tajam. Pemerintah desa sepatutnya dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi untuk menambah PADes. Peningkatan PADes tidak dapat terlepas dari sumbangsih dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Nilai kebersamaan dan gotong royong masih menjadi andalan daerah perdesaan untuk dapat berdiri diatas kaki sendiri. Artinya, pemerintah desa harus lebih melibatkan dan bergandengan tangan dengan penduduknya untuk memajukan kemaslahatan bersama. Sehingga, harmonisasi yang lebih intens antar stakeholders perlu dipererat.

KESIMPULAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam pengembangan BUMDes Mawa Raharja yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat. Peran yang pertama ialah sebagai dinamisator. Sebagai dinamisator, Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan Pendampingan dan Pembinaan serta Pelatihan. Peran yang kedua adalah sebagai fasilitator. Berarti menyediakan keperluan yang dibutuhkan oleh desa selama kegiatan pemberdayaan. Misalnya adalah penyediaan keperluan untuk pertanian seperti bibit unggul, polybag dan tanah. Proses kegiatan yang berlangsung di Desa Cibiru Wetan memiliki beberapa hambatan yang dialami oleh tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Hambatan pertama menurut penjelasan PUEM (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat) adalah kendala teknis seperti jalan dan waktu. Sementara dari Bidang Bina Desa menyebutkan hambatannya adalah pendapatan desa yang kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hikam, "Kekerasan Negara, Militer, Budaya Politik dalam Ideologisasi Pembangunan di Indonesia", dalam Suaedy, ed. Kekerasan dalam Perspektif Pesantren, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000).
- Agus Surjono, & Trilaksono Nugroho, Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
- Azhar, Kemil., Ajeng. 2022. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
- Bariqi, Muhammad Darari. 2018. Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya. Manusia. Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis. Vol. 5 (2).
- Bob Mullaly, Challenging Oppression: A Critical Social Work Approach (Oxford University Press Canada, 2002, hlm. 2.
- Bruce J. Biddle, Role Theory Expectations, Identities, and Behaviors (New York: Academic Press Inc, 1979), 56. 8 Bruce J. Biddle, Role Theory Expectation, Identitie, and Behavioris, 57.
- Dani Ramdhani, 2014. Strategi Pengembangan Rm. Nasi Bancakan Sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner Di Kota Bandung.
- Fazrina. Dytta. 2016. Pemanfaatan Hasil Belajar Pada Pelatihan Keterampilan Mekanik Otomotif.
- Fitria. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Adl Islamic Economic. Vol.1. No.1.
- Ginanjari K., Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan, dan Penerapan, (1997:55) 11 Jim Ife, Rethinking Social Work towards Critical Parctice, (Longman, 1997),

- Jim Ife & Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Joesoef Soelaiman, 2004, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- John Brohman, *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*, (Blackwell Publishers 2001), hlm 202.
- Kasming. 2019. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan kelompok Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*.
- Kresnawati., Siti Hanila. 2019. *Strategi Inovasi Bumdes Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Seluma Dengan Metode Criterium Plus – AHP*. Jurnal Ilmiah Manajemen ISSN Volume 14. No.2, Oktober 2019: 195-209.
- Kurdie Syuaeb, 2002, *Pendidikan Luar Sekolah*. Cirebon: CV. Alawiyah.
- Mansour Fakih, *Ibid*, hlm. 30
- Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm. 17.
- Michellin J. Hindi, *Role Theory* . The Blackwell Encyclopedia of Sociology edited by George Ritzer. (London: Blackwell Publishing, 2007), 3959-3962.
- Muhamad, Muflih. 2021. *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Muliyani, Febri. 2021. *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Muttaqin. Et al. 2019. *Desa Mitra dalam Budidaya Tanaman Obat Keluarga Menuju Desa Cibiru Wetan sebagai Sentra Herbal*. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 3(2), 159-164.
- Nasib, Salmun K., et al. *Optimalisasi Potensi Desa Untuk Pencapaian Sustainable Development Goals*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 7(3), 2022, pp. 621-630.
- Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, poin penting dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004.
- Paul B. Horton and Chester L. Hunt, *Sociologi Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari Jilid Satu Edisi Keenam* (Jakarta: Erlangga, 1987), 118.
- Paul B. Horton dan Robert L. Horton, *Introductory Sociology*, (USA: Dow Jones-Irwin, 1982), 19.
- Paul B. Horton dan Robert L. Horton, *Introductory Sociology*, 19.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 tahun 2016 tentang Organisasi Kedudukan dan Susunan di Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81.
- Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996)
- Randy R.Wrihatnolo & Riant Nugroho D. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007).
- Robert Adams, *Social Work and Empowerment*. 3rd ed.(New York: Palgrave Macmillan, 2003).
- Rosmedi Dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro), Hlm. 1.

- Ruslan. Et al. 2021. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD) dalam Pemberdayaan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan. Jurnal Fokus Penelitian Budaya : Masalah-Masalah Kebudayaan dan Masyarakat. Volume 6 No 2.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, et al. 2019. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 7, Number 1, 2019, pp. 5 – 13.
- Soelaman Joesoef, Konsep Dasar Pendidikan non formal. (Jakarta: Bumi Aksara. 1992) hal 50.
- Soelaman Joesoef. hal 51.
- Soemardjan, S. (2006). dalam Soerjono Soekanto, 22.
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, h.
- UU no 11 tahun 2010, tentang Cagar Budaya.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- UU Sisdiknas No. 20Tahun 2003.
- UUSPN No. 20 tahun 2003.
- Yulisa,Tiara Rizqi., Dewi Rahmi. 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Bandung Conference Series: Economics Studies.
- Yuniarti, Sri Ayu. 2014. Tari Cokek di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta Timur.